

INVENTARISASI BAHASA-BAHASA DAERAH DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

*Inyo Yos Fernandez**

ABSTRACT

The inventarisation to understand the number and status of languages dialects in East Nusa Tenggara should be conducted using the right theory and methodology. The inventarisation should be done by implementing quantitative and qualitative approaches so that satisfactory results can be achieved in the process of inventarisation in the future. Despite the fact that there may be some weaknesses in the use of the quantitative approach to determine family language using kexicostatistics technique, the result may provide clear and reliable descriptions of the NTT family language

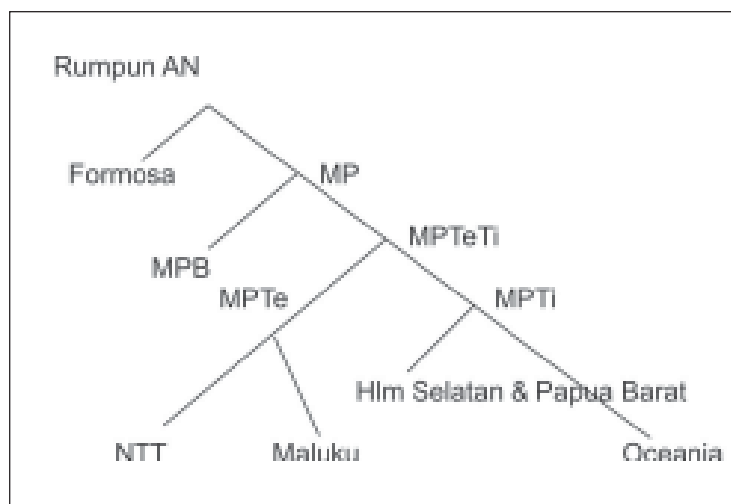
Key words : inventarisasi, pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, bahasa-bahasa di Nusa Tenggara Timur

PENGANTAR

Sejumlah besar bahasa di Nusa Tenggara Timur dan Maluku termasuk dalam golongan anggota subkelompok bahasa MPT atau (CMP). Selain itu, di Maluku dan di NTT terdapat bahasa-bahasa yang nonanggota subkelompok MPT. Ada beberapa nama yang diberikan bagi kelompok bahasa-bahasa itu, seperti *Filum Papua Barat* (Stokhof, 1978), *Filum Trans Nugini* (Wurm, 1975). Namun, yang lebih umum dikenal adalah kelompok bahasa-bahasa Non Austronesia (AN).

Selain subkelompok bahasa MPT, sesuai dengan pengelompokan bahasa-bahasa AN di kawasan Nusantara masih terdapat juga subkelompok bahasa MPB atau WMP dan MPT atau (EMP). Bahasa-bahasa yang berada di kawasan

transisi merupakan bahasa-bahasa kerabat yang secara geografis terletak di antara subrumpun MPB dan MPT (Blust, 1977).³ Garis silsilah kekerabatan subrumpun bahasa MP sebagai cabang dari rumpun bahasa AN sebagaimana diutarakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut.



* Staf Pengajar Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Dalam diagram pohon silsilah kekerabatan bahasa serumpun tersebut tampak relasi kekerabatan bahasa antarsubrumput MP dengan subrumput Formosa.⁴

Selanjutnya, cabang MP dipisahkan atas dwipilah MPB, dan MPTeTi. Pada gilirannya masing-masing dipilah lagi atas cabang dwipilah MPTe dan MPTi. Subkelompok bahasa-bahasa MPTe selanjutnya terpisah atas cabang subkelompok bahasa di NTT dan Maluku, sedangkan cabang bahasa-bahasa MPTi menurunkan cabang dwipilah bahasa-bahasa di Halmahera Selatan dan Papua Barat. Adapun di sisi lain cabang subkelompok MPTi menurunkan bahasa-bahasa yang termasuk anggota subkelompok Oceania diturunkan (Blust, 1977).⁵

Apabila hasil pemetaan bahasa di Indonesia yang pertama kali dipublikasi oleh Esser (1938), yang diterbitkan Salzner (1960) tampak jelas hasil kompilasi yang berasal dari pemikiran Jonker. Pandangan Jonker itu tampaknya menjadi sumber inspirasi utama bagi pemetaan bahasa-bahasa di wilayah ini ketika Wurm dan Hattori (1981-1983) menerbitkan peta bahasa terbaru dengan informasi yang masih sama dengan pandangan Jonker tersebut.⁶

Pemberian label kelompok bahasa-bahasa Timor-Alor yang diusulkan Greenberg (1971) bagi sekelompok bahasa yang termasuk kelompok Filum Papua Barat di NTT dan Timor Leste patut mendapat perhatian khusus karena istilah kelompok bahasa-bahasa itu perlu dibedakan dari subkelompok Ambon-Timor. Subkelompok bahasa Ambon-Timor itu merupakan salah satu bagian yang tidak dipisahkan dari istilah subkelompok Bima-Sumba dalam kelompok bahasa-bahasa AN di kawasan transisi, yaitu wilayah bahasa-bahasa yang termasuk subkelompok AN Tengah atau MPT.

Para linguis Belanda seperti Riedel (1885), Cowan (1963, 1973) telah mengidentifikasi ciri-ciri bahasa Non-AN di wilayah Maluku Utara. Demikian pula, Jong (1935) telah menjelaskan

hal yang sama tentang bahasa Oirata di pulau Kisar, Maluku Barat Daya, dengan menggambarkan sekelumit perbedaan ciri-cirinya dengan bahasa-bahasa subkelompok bahasa MPT yang tersebar di kawasan transisi. Stresseman (1927) mengklasifikasi bahasa-bahasa kelompok Ambon. Capell (1951), Berthe (1969), Stokhof (1975), dan Steinhauer (1989) mengungkapkan hal yang serupa khususnya tentang bahasa-bahasa yang termasuk anggota kelompok Timor-Alor.

Apabila pengelompokan bahasa-bahasa kerabat dalam subkelompok MPT ditinjau secara sekilas, dapat diamati bahwa ciri-ciri khusus bahasa-bahasa di daerah tertentu, seperti yang dapat dijumpai di antara beberapa bahasa di Flores dan Timor, memiliki sejumlah kemiripan sintaksis tertentu dengan bahasa-bahasa Non-AN yang tersebar di wilayah itu. Hal tersebut dimungkinkan karena kontak bahasa yang telah lama berlangsung antar-bahasa Non-AN dan bahasa-bahasa AN di kawasan itu. Kemiripan fitur-fitur linguistik yang demikian jika dibandingkan dengan yang terdapat pada bahasa-bahasa anggota subkelompok MPB, bukan merupakan fenomena kebahasaan yang berciri AN yang bersifat paralel sehingga cenderung dapat dipandang seolah-olah sebagai fitur-fitur yang ditandai sebagai ciri-ciri inovasi bersama yang dialami secara eksklusif di bidang sintaksis pada bahasa-bahasa anggota subkelompok MPT karena ciri-ciri serupa itu tidak dialami oleh bahasa-bahasa subkelompok MPB. Salah satu kemungkinan, terdapat dugaan bahwa kemunculannya berasal dari hasil proses hibridisasi akibat kontak yang terjadi dengan bahasa-bahasa Non-Austronesia khususnya di bidang sintaksis dan kemudian secara paralel menyebar pada bahasa-bahasa anggota MPT lain. Hal itu dapat diamati pula pada tataran fonologi dan leksikon.⁷ Sejumlah kemiripan fitur gramatikal yang cukup menonjol pada tataran sintaksis seperti diuraikan dalam karya Fernandez (2000). Hal itu bukan mustahil dapat dipandang sebagai hasil saling

pengaruh yang terjadi akibat kontak bahasa yang telah lama berlangsung antarbahasa Non-AN dengan bahasa-bahasa anggota MPT.

Patut dicatat pula bahwa adakalanya status keanggotaan bahasa-bahasa itu bukan mus-tahil terjadi bahwa salah satu bahasa telah diidentifikasi sebagai bahasa Non-AN, ternyata termasuk anggota subkelompok bahasa MPT. Karya Capell pada awal tahun 1950-an tentang bahasa-bahasa di Flores, atau karya Walker (1980) tentang bahasa Sawu, dapat diperlihatkan sebagai salah contoh dari kekeliruan serupa itu. Demikian pula, Alan (1967) menyatakan bahwa bahasa Kemak, di Timor Leste, semula diduga sebagai bahasa AN, tetapi setelah dicermati, ternyata bahasa itu termasuk anggota kelompok bahasa Non-AN.

Penelitian Dyen (1965) terhadap sekitar 245 bahasa sekerabat rumpun AN, berdasarkan kajian kuantitatif, menjelaskan bahwa untaian Maluku (istilah bagi *Mollucan linkage*) anggotanya meliputi bahasa-bahasa di Maluku dan NTT seperti dikutip Uhlenbeck (1971). Dalam peninjauan kembalinya karya tsb. Dyen (1982), di antara bahasa-bahasa di Nusa Tenggara peringkat tertingginya terdapat pada Flores dan Bali. Sesuai dengan hasil kajian kuantitatif itu, terbuka peluang bagi kajian hubungan kekerabatan bahasa-bahasa secara internal, baik di dalam subkelompok Flores bagi Fernandez (1988) maupun bagi Mbetse (1992) dalam mengkaji relasi kekerabatan subkelompok Bali-Sasak-Sumbawa. Keragaman etnis yang tercermin melalui bahasanya di daerah itu tersimpan aset budaya yang kaya. Implikasi dari kajian yang dilakukan Dyen di atas kajian terhadap bahasa-bahasa berkerabat di NTT, seperti yang dilakukan oleh Budasi (2007) yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dilakukan pengelompokan bahasa-bahasa Sumba yang terdiri atas tujuh bahasa berkerabat telah dikaji.

Dalam rangka inventarisasi bahasa-bahasa di NTT untuk mencatat jumlah bahasa dan dialek-dialeknya, baik yang berkerabat erat

maupun bahasa-bahasa lain yang berada di luar suatu subkelompok bahasa, tentu saja perlu dilakukan perhitungan yang lebih cermat menyangkut jumlah dan status bahasa (termasuk bahasa kelompok pemukim imigran seperti komunitas etnik Bajau) yang tersebar di berbagai daerah di NTT. Untuk memperoleh hasil yang semakin sesuai dengan kenyataannya, kekayaan budaya bangsa dalam bahasanya, inventarisasi bahasa yang menyangkut jumlah dan statusnya perlu ditangani dengan pertanggungjawaban yang lebih baik. Penelitian bahasa berkerabat dan pembagian dialek-dialeknya perlu dilakukan secara sistematis dan mempertimbangkan penggunaan metode yang tepat dan teori yang sesuai dengan keadaan bahasa-bahasa di tanah air.

Untuk mendapatkan hasil yang semakin sesuai dengan kenyataannya, inventarisasi bahasa yang menyangkut jumlah dan statusnya perlu ditangani dengan pertanggungjawaban yang lebih baik. Penelitian bahasa berkerabat dan pembagian dialek-dialeknya perlu dilakukan secara sistematis dan mempertimbangkan penggunaan metode dan teori yang tepat⁸, sesuai dan memadai. Perlu diperhatikan agar dalam rangka inventarisasi bahasa, termasuk penetapan jumlah bahasa, tidak semata berdasarkan pengakuan penutur semata, seperti yang hingga kini berlaku, baik oleh kalangan linguist asing maupun pribumi.

INVENTARISASI YANG MEMPRIHATINKAN TERHADAP BAHASA-BAHASA DI NTT

Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari hasil survei tim peneliti SIL (*Summer Institute of Linguistics* atau SIL (1997) yang dimuat pula dalam majalah "*Ethnology Language of the World*", edisi ke-15 (Grimes, 2000), inventarisasi bahasa-bahasa di NTT dewasa ini, diketahui bahwa terdapat 61 bahasa yang tersebar di wilayah provinsi ini dan dapat dirinci menjadi (1) bahasa-bahasa di Flores dan Lembata sebanyak 28 bahasa, (2) bahasa-bahasa di Kabupaten Alor

berjumlah 17 bahasa, (3) bahasa-bahasa di Sumba (termasuk bahasa Sawu) berjumlah 9 bahasa, dan (4) bahasa-bahasa di Timor berjumlah 7 bahasa (tidak termasuk bahasa-bahasa yang terdapat di Timor Leste).

Cara-cara yang digunakan oleh tim peneliti SIL, Grimms dkk. (1997), tersebut dalam penetapan jumlah dan status bahasa-bahasa serta dialek-dialek di NTT seperti yang diungkapkan itu secara keseluruhan cukup memprihatinkan sehingga dapat menyebabkan hasil inventarisasi yang dilakukan patut diragukan dan beresiko tidak dapat dipercaya. Mengapa terjadi demikian? Alasannya, oleh karena tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan. Sebagai satu contoh, seperti hasil yang dicapai ketika inventarisasi bahasa-bahasa di Kabupaten Flores Timur dilakukan, Bahasa-bahasa berkerabat yang seharusnya diperkirakan berjumlah 6 bahasa saja, di daerah itu dicatat telah mencapai 11 bahasa (tidak termasuk bahasa Melayu Larantuka dan bahasa Bajo di beberapa lokasi enklave di daerah itu). Terjadi pengelembungan angka (jumlah) bahasa di kabupaten Flores Timur dan Lembata. Hal itu dimungkinkan karena penetapan jumlah bahasa yang hanya didasarkan pada pengakuan penutur bahasa setempat saja sehingga bukan mustahil pandangan itu tidak dapat diterima. Demikian pula, penggunaan teori dan metode dalam pengumpulan dan analisis data perlu dipertimbangkan sebagai faktor penting bagi penetapan inventarissi yang berhasil.⁹

Dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan Grimes dkk. tersebut, karya Lauder dkk. (2000) telah lebih jelas menggunakan metode kuantitatif yang cenderung menerapkan teknik dialektometri. Walaupun demikian, belum dilakukan hasil analisis data yang dijaring melalui 30 titik pengamatan seperti tampak pada publikasi *Monografi 200 kosa kata dasar Swadesh bahasa sekerabat di Kabupaten Flores Timur*. Dalam publikasi itu telah dinyatakan terdapat dua belas bahasa di Flores Timur, hanya sayangnya penetapannya baru sebatas berdasarkan pengakuan penutur

belaka. Pernyataan tentang jumlah itu pun sebenarnya masih jauh dari kenyataannya karena ternyata jauh melampaui jumlah yang sebenarnya, meskipun dalam jumlah itu belum terbilang dialek bahasa Melayu setempat (Steinhauer, 1985, Kumanireng, 1982). Demikian pula, variasi bahasa Bajau yang terpencah di berbagai enklave di daerah itu

Persoalan lain yang tidak jarang juga dijumpai ketika kegiatan penetapan jumlah dan status bahasa dan dialek-dialek dilakukan, baik di Indonesia pada umumnya maupun di NTT pada khususnya, adalah adanya silang pendapat di antara para linguis karena penggunaan metodologi yang berbeda atau tidak seragam sehingga tidak terhindarkan perbedaan hasil, baik yang berupa jumlah bahasa maupun dialek-dialeknya dalam klasifikasi atau kelompok bahasa. Hal demikian terjadi ketika penetapan jumlah dan status bahasa dilakukan di Kabupaten Alor. Menurut catatan Grimes dkk. (1997), terdapat 17 bahasa di Kabupaten Alor, tetapi Lauder mencatat terdapat 18 bahasa di daerah itu. Seperti dijelaskan Lauder (2000), adanya perbedaan itu hanya karena di antaranya ada sebuah desa yang memiliki dua bahasa yang berbeda, pada hal Grimes mencatat bahwa di desa yang sama itu hanya terdapat satu bahasa saja. Sekalipun data telah dihimpun dari 30 titik pengamatan dan dipublikasikan dalam *Monografi Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten Alor*, data itu belum sempat dianalisis.

Seandainya data itu dapat dianalisis dengan teknik leksikostatistik atau dialektometri, penetapan jumlah dan status bahasa dan dialek di daerah itu, masih juga terdapat kendala yang tak terhindarkan karena penggunaan instrumen penelitian dalam penjaringan data. Selain itu, kendala lainnya berupa perbedaan pendapat di antara penutur yang menyatakan pengakuan tentang jumlah bahasa dan dialek yang dipakai di suatu wilayah. Penetapan jumlah bahasa di Flores Timur dan Lembata yang dilakukan Grimes dkk. (1997) dengan mengandaikan pengakuan penutur tentang nama bahasa atau dialek bahasa setempat tidak hanya berdampak

pada penetapan Adonara, Lewoingu, Lamalera, dan Mingar di Flores Timur sebagai bahasa sendiri, tetapi terutama juga karena tanpa alasan yang kuat statusnya terdahulu hanya sebagai dialek-dialek dari bahasa Lamaholot saja yang dalam survei itu dipandang sebagai bahasa mandiri. Dalam penetapan serupa itu tampaknya kewibawaan penutur berdasarkan pengakuannya lebih berhasil memberi justifikasi tentang status bahasanya, tanpa pemahaman tentang perbedaan antara bahasa dan dialek. Penilaian serupa itu kurang tepat karena berdampak pada pengaburan jumlah dan status bahasa atau dialek yang ditetapkan dalam inventarisasi.

SIMPULAN

Dari hasil kajian yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi bahasa-bahasa di NTT, seperti yang telah diketahui melalui kajian dari para peneliti terdahulu, dapat dijelaskan bahwa masih terdapat kesimpangsiuran pendapat di kalangan para peneliti. Inventarisasi bahasa, untuk mengetahui jumlah dan status bahasa serta dialek bahasa-bahasa di NTT yang lebih memuaskan, masih menghadapi banyak kendala dan perlu dilakukan dengan pemanfaatan teori dan metodologi yang tepat dan benar.

Pendapat para sarjana yang masih simpang siur mengenai masalah inventarisasi bahasa yang terkait dengan jumlah, status, dan dialek-dialeknya terjadi khususnya karena penggunaan metode yang belum seragam. Apabila hanya mengandalkan pada pengakuan para penutur bahasa saja, jumlah bahasa maupun status bahasa belum dapat ditetapkan melalui cara yang lebih baik sehingga masih kurang meyakinkan hasilnya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang dapat mencapai hasil yang baik.

Cara yang masih memperlihatkan kelemahan yang cukup meragukan dalam hasil yang kurang sesuai dengan kenyataan perlu dihindari. Perlu digunakan teori dan metode yang lebih sesuai bukan hanya berdasarkan pengakuan penutur belaka sehingga hasil kajian yang dapat dicapai dapat diterima dan

diakui. Hasil kajian yang lebih mendalam terhadap bahasa-bahasa kerabat di NTT perlu menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sehingga dapat dicapai hasil yang lebih memuaskan pada masa yang akan datang dalam melakukan inventarisasi bahasa-bahasa kerabat di NTT yang lebih memuaskan. Meskipun penggunaan metode kuantitatif dalam penetapan jumlah bahasa kerabat baik dengan teknik leksikostatistik maupun dengan teknik leksiko-statistik, tidak terlepas dari banyak kelemahannya, hasil yang dicapai untuk mencapai gambaran garis besar tentang silsilah kekerabatan bahasa-bahasa di NTT, masih lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan jika tidak hanya mengandalkan pengakuan penutur bahasa setempat belaka, melainkan melalui kajian penelitian yang lebih bermutu dan dapat diandalkan.

- ¹ Menurut Blust, klasifikasi atau pengelompokan bahasa-bahasa MP berdasarkan metode kualitatif dengan evidensi inovasi bersama mengenai salah satu kategori sintaksis yaitu perbandingan kata ganti orang (personal pronoun).
- ² Selain evidensi di bidang sintaksis, ditemukan oleh Blust evidensi pengelompokan berdasarkan sejumlah inovasi fonologis bersama secara eksklusif yang mengukuhkan pula evidensi sintaksis itu.
- ³ Karya Jonker (1918) yang orisinal itu, masih dapat ditelusuri melalui hasil karyanya mengenai bahasa-bahasa di kawasan NTT dan sekitarnya yang dimuat di dalam buku *Encyclopedie van Nederlandsch Indie* jilid 2. Penjelasan yang disampaikan Jonker khususnya mengenai subkelompok bahasa AN di kawasan itu merupakan tindak lanjut pengelompokan bahasa-bahasa di Indonesia yang disarankannya sebagai alternatif menyusul sanggahannya terhadap karya pengelompokan Brandes yang dimuat di dalam majalah *Ilmu Pengetahuan Kerajaan Belanda* yang terbit tahun 1914.
- ⁴ Bahasa-bahasa di NTT yang termasuk anggota subkelompok Ambon-Timor terdiri atas bahasa-bahasa di Timor termasuk bahasa Tetum, Bunak, Kemak, Dawan, Helong, Roti, dan Sabu. Selain itu, bahasa-bahasa di Flores Timur termasuk di antaranya bahasa Lamaholot, Melayu Larantuka, Kedang, dan Sika Muhang. Bahasa-bahasa anggota subkelompok Bima-Sumba terdiri dari bahasa Bima dan ke 7 bahasa di Sumba. Selain itu, bahasa Manggarai, Rembong, Ngadha, Lio, dan Palue.

- ⁵ Secara leksikal kata 'jagung' dalam bahasa Lamaholot wata' berkorespondensi dengan batar pada bahasa non Austronesia di Pantar, dan Oirata (di Kisar). Demikian juga, seperangkat fonem hambat implosif /ú, ï, ì, tidak hanya ditemukan pada bahasa Sahu, di Halmhera Utara (yang termasuk kelompok non AN) tetapi ditemukan juga pada bahasa Sawu (Walker, 1980) di NTT, seperti juga terdapat pada bahasa-bahasa Ngadha, Lio, dan Palu'e di Flores Tengah (Fernandez, 1988), bahasa Bima di NTB (Syamsyuddin, 1995) dan bahasa Sumba (Budasi, 2007).
- ⁶ Sebagai contoh, penggunaan teori leksikografi untuk mengkaji kekerabatan bahasa-bahasa di Kalimantan Selatan (Lauder, dkk., 2002), dan di Sulawesi Tengah (Lauder, dkk., 2000) merupakan kekeliruan dalam penggunaan teori yang terpadu dengan metode yang tepat sehingga hasilnya diragukan.
- ⁷ Dalam kajian Keraf (1977) yang dimuat dalam majalah DIAN, telah ditetapkan klasifikasi bahasa dan dialek bahasa-bahasa di Kabupaten Flores Timur. Keraf pada prinsipnya berpendapat bahwa di Kabupaten Flores Timur (ketika itu Pulau Lembata belum menjadi sebuah kabupaten tersendiri, terdapat 4 bahasa, yaitu Lamaholot, Melayu Larantuka, Kedamng, dan Sika Krowe. Mengenai situasi kebahasaan, jumlah bahasa dan status bahasa-bahasa di Flores Timur, pendapat Keraf (1978) perlu dicatat. Kalkulasi persentase leksikostatistik digunakannya dalam penetapan peringkat kekerabatan bahasa-bahasa di Flores Timur dan khususnya dialek-dialek bahasa Lamaholot. Hasil temuannya masih dapat diterima karena menggunakan metode yang jelas dan melalui penelitian yang mendalam. Dengan demikian, hasil yang dicapai lebih dapat diterima jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai berdasarkan penetapan yang dilakukan atas dasar pengakuan penutur bahasa semata.

DAFTAR RUJUKAN

- Berthe. 1969. *La Langue Fataluku. Asie du sud-est et monde insulindien*. Paris, 4(3), hal. iii-iv.
- Blust, R. A. 1982. "The Linguistic Value of Wallace Line" *BKI*. 138, hal. 231-250.
- . 1977. "The Proto Austronesian Pronoun and Austronesian Subgrouping Hypothesis. A Preliminary Report. Working Paper in Linguistics 9(2), hal. 1-15.
- . 1978. "The Proto Austronesian Palatals. Memoir 43: Wellington. The Polynesian Society.
- Budasi, I Gede. 2007. "Proto Bahasa Sumba". Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Capell, A. 1969. "The Prehistory of Indonesia". *Oceanic Linguistics*. 12, hal. 37-47.
- Collins, James T. 1983. "The Historical Relationships of the Languages of Central Maluku, Indonesia". *FL*. D.47.
- Cowan, H.K.J 1963. *Le Buna de Timor. Une langue "uest Papoue"*. *BILV*, 119 (4), hal. 387-400.
- . 1973. *Note sur la Langue Oirata. Asie du sud-est et monde insulindien*. Paris, 4(3):iii-iv.
- Dyen Isodore. 1965. *A Lexicostatistical Classification of the Austronesian Languages*. Baltimore. *Memoir 19. Supplement to the IJAL*.
- . 1982. "The Present Status of Some Austronesian Subgrouping Hypothesis". In Amran Halim, Louis Codrington and Wurm eds. *Papers from the TICAL vol. 2:32-33. FL*. 75.
- Esser, S.J. 1938. *Atlas van Tropisch Nederland*. Batavia. Centrum.
- Fernandez, Inyo Yos 1988. "Protobahasa Flores". Disertasi Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- . 1996. *Relasi Historis Kekerabatan Bahasa Flores*. Ende: Nusa Indah.
- . 2000. "On the Search of Relationship between languages of Austronesia and Non Austronesian in East Indonesia". Dalam Sudaryanto dan Aleks Horo Rambadeta (eds.) *Languages and Cultures Relationship in Non Austronesian Area*. Yogyakarta: Pusat Studi Asia Pasifik UGM.
- . 2007. "Penelusuran Pustaka tentang Kajian Pengelompokan Bahasa-Bahasa di Propinsi Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur". Laporan Penelitian untuk Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. Depdiknas. Jakarta.
- Greenberg. 1971. "Timor-Alor subgrouping" In Thomas Sebeok (ed.) *Current Trends in Linguistics*.
- Grimes, Barbara F. 2000. "Numbers of Austronesian Languages" in *Ethnology Language of the World*, edisi ke-15
- Jonker, H.C. G. 1914. "Van Men de talen van den Indischen Archipel eenewestelijke en eene oostelijke Afdelingen onderscheiden". Amsterdam: *Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Akademi van Wetenschappen* 12, hal. 235-63.
- . 1918. "Manggaraisch". *Encyclopedie van Nederlandsch Indie*. Mouton: The Hague
- Keraf, Gregorius. 1977. "Status bahasa-bahasa di Flores Timur". *Dian* (4) 7:18, 8, hal. 14-15
- Moete, Aron Meko 1992. "Proto Bahasa Bali-Sasak-Sumbawa". Disertasi. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Riedel, Von J.G.F. 1885. *Galela und Tobaloesen*. Utrecht: Hollandischen Residenten.
- Salzner, Richard. 1960. *Sprachenatlas des Indopazifischen Raumes*. Wiesbaden: Otto Harossowitz

- Steinhauer, Hein 1989. *Bahasa Blagar*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Stokhof, Wim 1978. *Fonemik Bahasa Woisika*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Stresemann, E. 1927. *Die Lautererscheinungen in den Ambonischen Sprachen*. Beiheft.10 Reimer: Berlin
- Syamsuddin, A.R. 2002, *Pengelompokan Bahasa Bima-Sumba*. Disertasi. Bandung: UNPAD
- Uhlenbeck, E. M.1971. "Indonesia and Malaysia". In Thomas Sebeok (ed.) *Current Trends in Linguistics*.
- Voorhoeve, C.L. 1983. *The Non Austronesian Languages in the North Moluccas*. Dalam E.K.M. Masinambow (ed.) Halmahera dan Raja Ampat sebagai Kesatuan Majemuk (Studi-studi terhadap suatu Daerah Transisi. Jakarta: Lembaga Ekonomi dan masyarakat Nasional. LIPI.
- Wurm, S.A. dan Shiro Hattori 1983. "Maps of Insular South-East Asia. II" PL.C.67. Canberra. The Australian Academy of Humanities.